



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2020



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9;
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

B. Tugas dan Fungsi

- Tugas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Secara khusus tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta pelaporan.
 2. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.
 3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan.



4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan, pengendalian pengembangan dan administrasi desa, pengembangan kelembagaan dan kapasitas desa.
 5. Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembangunan Desa dan kelurahan.
 6. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat.
 7. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

 1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian keijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan dan sosial budaya masyarakat;
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan



C. Struktur Organisasi

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, membawahkan;
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- 3) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 - a. Seksi Penataan, Administrasi dan Kelurahan;
 - b. Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - c. Seksi Kapasitas Desa dan Kelurahan.
- 4) Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan Desa;
 - b. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Informasi Desa dan Kelurahan.
- 5) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat; dan
 - c. Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.
- 6) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - c. Seksi Pendayagunaan Prasarana dan Sarana Desa dan Kelurahan

D. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh 78 pegawai yang terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| a. Pegawai Negeri Sipil Daerah | : | 42 orang |
| b. Pegawai Tidak Tetap (PTT) | : | 0 orang |
| c. Non PTT | : | 32 orang |



Rincian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) 2020 :

No	Jumlah PNS	
1	Menurut Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
	a. Pembina Utama Madya (golongan IV/d)	1
	b. Pembina Tingkat I (golongan IV/b)	3
	c. Pembina (golongan IV/a)	7
	d. Penata Tingkat I (golongan III/d)	16
	e. Penata (golongan III/c)	3
	f. Penata Muda Tingkat I (golongan III/b)	7
	g. Penata Muda (golongan III/a)	1
	h. Pengatur Tingkat I (golongan II/d)	3
	i. Pengatur (golongan II/c)	0
	j. Pengatur Muda Tingkat I (gol. II/b)	0
	k. Pengatur Muda (golongan II/a)	1
	l. Juru Tk.I (golongan I/d)	0
	Jumlah	42
2	Menurut Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
	a. Doktor (S3)	0
	b. Pasca Sarjana (S2)	11
	c. Sarjana (S1)	25
	d. Sarjana Muda (D3)	0
	e. SLTA	6
	f. SLTP	0
	g. SD	0
	Jumlah	42
3	Menurut Gender	Jumlah (orang)
	a. Laki-Laki	23
	b. Perempuan	19
	Jumlah	42



Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	1		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	2	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Kasubbag	1	2		3	-	-	0	3	-	-	-	-
Kasi	7	5	5	7	-	-	4	8	-	-	-	-
Jlh PNS NON-STRUKTURAL	11	11	1	17	4	0	2	20	0	0	0	0
Jlh Honor/ PTT	18	14	-	-	-	-	-	31	0	1	0	0
Jlh PNS + Honor/PTT	41	33	11	27	4	0	11	62	0	1	0	0



E. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun aspek strategis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mencakup :

- a. Peningkatan Peran lembaga usaha ekonomi masyarakat melalui peningkatan BUMDes
- b. Peningkatan dan pengembangan pembangunan desa melalui optimalisasi penggunaan dana desa
- c. Pembinaan kapasitas Pemerintahan desa
- d. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan Desa/keluurahan.
- e. Penguatan ketangguhan desa dalam mengahdapi bencana dan perubahan iklim melalui pembinaan dan pengembangan desa/kampung rendah emisi.

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Adapun permasalahan utama (Isu Strategis) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam adalah sebagai berikut :

1. Tingginya jumlah Desa tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur
2. Penurunan kualitas lingkungan hidup

Beberapa hal yang menjadi masalah atau penyebab dari permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa.
2. Belum optimalnya peningkatan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi desa.
3. Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan belum berjalan dengan baik.
4. Belum optimlanya fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa.
5. Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan kawasan perdesaan.
6. Masih tingginya Emisi GRK.



G. Sarana dan Prasarana Kerja

Guna mendukung pekerjaan sehari-hari tersedia sarana dan prasarana kerja pendukung sebagai berikut:

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	8.228	M2
2	Gedung	3	Unit (3 lantai)
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	jaringan
5	Telepon	2	jaringan
6	Area Parkir	3	area
7	Ruang Rapat	2	ruang
8	Taman	1	area
9	Masjid	1	unit

(Daftar Terlampir)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen mendukung dan melaksanakan Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

1. V i s i

“ Berani untuk Kalimantan Timur berdaulat ”

2. M i s i

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih profesional dan berorientasi pelayanan publik.

3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan di Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dituju oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatnya Kualitas Pembangunan wilayah Perdesaan secara merata.

5. Strategi

1. Pemantapan dan peningkatan peran lembaga usaha ekonomi masyarakat



2. Peningkatan dan pengembangan pembangunan desa
3. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Membangun desa berkualitas
4. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif
5. Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim

6. Kebijakan

1. Peningkatan Bumdes yang aktif untuk meningkatkan ekonomi desa
2. Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa untuk mencapai status desa berkembang
3. Pembinaan kapasitas desa yang memiliki konsistensi perencanaan dan anggaran
4. Peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
5. Pembinaan dan pengembangan Desa/Kampung rendah emisi.

7. Program dan Kegiatan

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 2. Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 3). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
 3. Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah
- 4). Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
 5. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- 5). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 6. Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan
 7. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
 8. Pengembangan Kapasitas Masyarakat
 9. Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat
- 6). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
 10. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
- 7). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa



11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 8). Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
 12. Sinkronisasi dan Penyerasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat.
- 9). Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
 13. Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
 14. Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat.
- 10). Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
 15. Pengembangan dan Monitoring Ketahanan keluarga dan Pelestarian nilai nilai Kegotong – royongan.
 16. Penguatan Kapasitas Kesejahteraan Keluarga.
 17. Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga.
 18. Pengembangan dan Monitoring Hidup Sehat Keluarga yang Ramah Lingkungan.
- 11). Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat
 19. Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- 12). Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 20. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan
 21. Monitoring Penyaluran Keuangan Desa
 22. Peningkatan Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 13). Program Pembangunan Desa dan Kawasan
 23. Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa
 24. Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa
 25. Penguatan Informasi Pembangunan
- 14). Program Kampung Iklim
 26. Pemberdayaan dan Pengembangan Emisi Rendah Desa/Village Low Emission Development (VLED)



1. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Kegiatan dengan anggaran murni, sebelum rasionalisasi sebesar Rp. 20.714.553.560,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) Setelah Rasionalisasi sebesar Rp. 15.004.833.280,- (Lima Belas Milyar Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi Rp. 16.411.712.030,- (Enam Belas Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 8.330.513.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Belanja Langsung sebesar Rp. 8.081.199.030,- (Delapan Milyar Delapan Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah).

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 14.597.966.586,- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 88.95 % dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.707.717.904 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Sembilan Ratus Empat Rupiah) atau sebesar 88.95%. dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.890.284.682,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 97.64%.

2. Target Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 8.330.513.000,-	Rp. 6.707.717.904,-	88.95
2	Belanja Langsung	Rp. 8.081.199.030,-	Rp. 7.890.284.682,-	97.64
	Jumlah	Rp. 16.411.712.030,-	Rp. 14.597.966.586,-	88.95



3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 8.081.199.030	97.64	



B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

No	Komponen Yang Nilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
1	2	3	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30 %	22.73	21.07
2	Pengukuran Kinerja	25 %	15.94	15.04
3	Pelaporan Kinerja	15 %	10.42	10.42
4	Evaluasi Kinerja	10 %	6.35	6.85
5	Capaian Kinerja	20 %	12.38	11.5
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	67.82	65.78
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 65.78 (Enam Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Delapan) dengan predikat penilaian "B". Dari segi pencapaian mengalami penurunan capaian nilai sebesar 2.04 (Dua Koma Nol Empat)

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

No	Rekomendasi		Tindak lanjut/Rencana Aksi	Sudah/Belum
1	Pada dokumen perencanaan meskipun dari pemenuhannya telah memadai namun untuk kualitas dan implementasi masih memerlukan perbaikan antara lain : - Meningkatkan kualitas dokumen Renstra dan RKT/PK dalam :	1	Perbaikan dokumen perencanaan : - Akan dilakukan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan : 1) Tujuan dan sasaran	- Melaksanakan perbaikan terhadap dokumen Renstra dan RKT/Perjanjian Kinerja - (Sudah)



<p>1) Menetapkan tujuan dan sasaran strategis berorientasi hasil (outcome)</p> <p>2) Sesuai dengan kriteria dalam hal menentukan ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) dan sasaran serta target baik, indikator kinerja baik, berorientasi hasil dan keselarasan (renstra dengan PK) serta menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan</p> <p>- Memanfaatkan dokumen Renstra/PK untuk :</p> <p>1) Memonitor capaian target kinerja jangka menengah sampai tahun berjalan dan sebagai dasar mengukur keberhasilan</p> <p>2) Memonitor rencana aksi atas dokumen PK (Perjanjian Kinerja) sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengarah dan pengorganisasian kegiatan, penyusunan (identifikasi) kinerja sampai tingkat eselon III</p>	<p>strategis berorientasi hasil (outcome)</p> <p>2) Kesesuaian kriteria untuk keberhasilan (indikator), tujuan (outcome) dan sasaran serta target yang berorientasi hasil dan keselarasan (Renstra dengan PK)</p> <p>- Akan memanfaatkan dokumen renstra/PK untuk memonitor capaian target jangka menengah sampai tahun berjalan serta memonitor Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja sampai tingkat Eselon III dan IV</p> <p>- Melalui Surat/Nota Dinas kepala DPMPD Prov.Kaltim dan Kegiatan Penguatan Kapasitas SAKIP di lingkup DPMPD Prov.Kaltim</p>	
---	---	--



	dan IV			
2	<p>Terhadap dokumen pengukuran kinerja agar :</p> <ul style="list-style-type: none">- Indikator kinerja Eselon III dan IV agar sepenuhnya memenuhi kriteria Indikator kinerja yang baik;- Ukuran (indikator) kinerja individu supaya mengacu pada unit kerja organisasi/atasannya;- Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dan dikembangkan menggunakan teknologi informasi;- Membangun pengumpulan data kinerja secara berkala (bulan/triwulan/semester), yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan mekanisme yang memadai dan berstruktur (jelas metode pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan, mencatat, melakukan mensupervisi dan berasal dari sumber data yang valid) atas Rencana Aksi yang telah ditetapkan;- Memanfaatkan hasil pengukuran capaian	2	<p>Terhadap dokumen pengukuran kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none">- Akan mengingatkan Eselon III dan IV melalui Surat /Nota Dinas Kepala DPMPD Prov.Kaltim agar dalam menetapkan indikator kinerja individu harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik- Akan meupayakan teknologi informasi untuk pengukuran (indikator) kinerja secara berjenjang- Akan membangun pengumpulan data kinerja secara berkala (Triwulan) berdasarkan Rencana Aksi yang telah ditetapkan dengan Surat/Nota Dinas Kepala DPMPD Prov.Kaltim dan menggagendakan rapat evaluasi kineja secara berkala (Triwulan) serta penunjukan Pejabat Pelaksana di Sub Bagian Perencanaan Program sebagai penanggungjawab pengumpulan data.- Akan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja dalam perencanaan dan penganggaran serta dasar pemberian rewarad dan punishment	<ul style="list-style-type: none">- Membuat dokumen pengukuran kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja- Membuat Indikator Kinerja Individu- Membuat Laporan Kinerja Per Triwulan- (Sudah)



	kinerja sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran dan dasar pemberian reward dan punishment sehingga dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.			
3	Terhadap LKJIP (Pelaporan Kinerja) agar: <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas laporan kinerja terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan informasi kinerja andal;- Memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja oleh pimpinan secara berlangsung untuk umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan pemberian reward dan punishment	3	Terhadap LKJIP (Pelaporan Kinerja) : <ul style="list-style-type: none">- Akan meningkatkan kualitas Pelaporan Kinerja- Pimpinan (secara berjenjang) akan diingatkan melalui Surat/Nota Dinas Kepala DPMPD Prov.Kaltim untuk memanfaatkan informasi kinerja dalam hal umpan balik, perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan	Membuat analisis capaian kinerja (sudah)
4	Terhadap dokumen evaluasi internal agar : <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan hasil evaluasi program atas Rencana Aksi yang telah	4	Terhadap Dokumen Evaluasi Internal : <ul style="list-style-type: none">- Akan mengeluarkan Surat/Nota Dinas Kepala DMPD Provinsi Kaltim kepada Eselon	Membuat dokumen Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi (Sudah)



	<p>dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memanfaatkan hasil evaluasi program secara nyata untuk umpan balik perbaikan perencanaan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja dan memberikan alternative perbaikan serta hasil evaluasi rencana aksi untuk dapat ditindaklanjuti dalam langkah nyata :- Hasil evaluasi digunakan untuk penilaian keberhasilan program yang terdokumentasi pemanfaatan atas Rencana Aksi sebagai pengendalian dan perbaikan kinerja selanjutnya (setiap Periode)		<p>III dan IV melakukan Evaluasi dalam rangka meningkatkan hasil kualitas pelaksanaan program atas rencana Aksi yang telah dilaksanakan dan dikomunikasikan/koordinasikan dengan berkepentingan</p>	
--	--	--	---	--



B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRI WULANAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	25	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	25	19	76
		2 Persentase Bumdesa Aktif	Persentase	25	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	25	25	100
		3 Persentase dengan status desa berkembang	Persentase	25	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	25	25	100



		4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan yang memperoleh pembinaan	Persentase	25	Triwulan I			
					Triwulan II			
				25	Triwulan III			
					Triwulan IV	25	25	100
		5 Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan yang aktif	Persentase	25	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	25	25	100
		6 Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	Persentase	25	Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV	40	40	100



C. Analisis Capaian Kinerja.

Sasaran : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	478 (25)	484 (19)	76
2.	Persentase Bumdesa Aktif	Persentase	25	25	100
3.	Persentase Desa dengan status berkembang	Persentase	25	25	100
4.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkembang	Persentase	25	25	100
5.	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	Persentase	25	25	100
6.	Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	Persentase	40	40	100

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2020
			2019	2020	
1	2	3	5	6	7
1.	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	503 (15)	484 (19)	76
2.	Persentase Bumdesa Aktif	Persentase	335 (25)	360 (25)	100
3.	Persentase Desa dengan status berkembang	Persentase	304 (25)	329 (25)	100
4.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkembang	Persentase	338 (25)	363 (25)	100



5.	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	Persentase	338 (25)	363 (25)	100
6.	Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	Persentase	15	40	100

3. Membandingkan anantara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra Tahun 2023	Realisasi Tahun 2020	Tingkat Kemajuan
1	2	3	5	6	7
1.	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	368 (45)	484 (19)	100
2.	Persentase Bumdesa Aktif	Persentase	470 (45)	360 (25)	76,59
3.	Persentase Desa dengan status berkembang	Persentase	439 (45)	329 (25)	74,94
4.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berkembang	Persentase	473 (45)	363 (25)	76,74
5.	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	Persentase	473 (45)	363 (25)	76,74
6.	Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	Persentase	150	40	26,66

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Dari hasil realisasi capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan " tidak semua tercapai sesuai yang ditargetkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal** diungkit berdasarkan hasil dari seluruh Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Untuk tahun 2020 dari target 25 Desa terealisasi 19 Desa atau terealisasi secara persentase 76 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Target dan Realisasi
Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Tahun 2020

NO	NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	STATUS IDM 2020	Ket
1	5	7	9	15	
1	Paser	Batu Sopang	Kasungai	Berkembang	Tercapai
2	Paser	Tanah Grogot	Muara Pasir	Berkembang	Tercapai
3	Paser	Muara Komam	Sekuan Makmur	Berkembang	Tercapai
4	Paser	Muara Samu	Muara Andeh	Tertinggal	Tidak Tercapai
5	Paser	Muara Samu	Tanjung Pinang	Tertinggal	Tidak Tercapai
6	Kutai Kartanegara	Anggana	Sidomulyo	Berkembang	Tercapai
7	Kutai Kartanegara	Anggana	Handil Terusan	Berkembang	Tercapai
8	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Menamang Kanan	Tertinggal	Tidak Tercapai
9	Kutai Kartanegara	Kota Bangun	Pela	Berkembang	Tercapai
10	Kutai Timur	Muara Wahau	Diaq Lay	Maju	Tercapai
11	Kutai Timur	Sandaran	Tanjung Mangkalihat	Tertinggal	Tidak Tercapai
12	Kutai Timur	Sandaran	Sandaran	Tertinggal	Tidak Tercapai
13	Kutai Timur	Kongbeng	Kombeng Indah	Berkembang	Tercapai
14	Kutai Barat	Jempang	Tanjung Jone	Berkembang	Tercapai
15	Kutai Barat	Jempang	Muara Ohong	Berkembang	Tercapai
16	Kutai Barat	Long Iram	Anah	Berkembang	Tercapai
17	Kutai Barat	Mook Manaar Bulatn	Muara Jawaq	Berkembang	Tercapai
18	Berau	Sambaliung	Long Lanuk	Berkembang	Tercapai
19	Berau	Sambaliung	Inaran	Berkembang	Tercapai
20	Berau	Batu Putih	Balikukup	Berkembang	Tercapai
21	Berau	Pulau Derawan	Pegat Batumbuk	Berkembang	Tercapai
22	Mahulu	Long Bagun	Long Merah	Berkembang	Tercapai
23	Mahulu	Long Bagun	Long Hurai	Tertinggal	Tidak Tercapai
24	Mahulu	Laham	Muara Ratah	Berkembang	Tercapai
25	Mahulu	Laham	Danum Paroy	Berkembang	Tercapai

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan untuk tahun 2020 target Jumlah Desa sangat tertinggal dan tertinggal yang statusnya akan ditingkatkan menjadi desa berkembang berjumlah 25 Desa dan yang naik statusnya atau terealisasi berjumlah 19 Desa (Tabel warna merah tidak naik statusnya).

- Keberhasilan / kegagalan :
Secara garis besar untuk indikator Kinerja status desa berkembang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan tidak terjadi penurunan walaupun untuk tahun 2020 tidak tercapai secara keseluruhan dari yang ditargetkan sejumlah 25 Desa.
- Peningkatan/Penurunan
Sesuai dengan target RPJMD yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun untuk meningkatkan status desa berkembang yaitu 150 Desa (2019-2023), telah mengalami peningkatan di mana Tahun 2019 dari yang telah ditargetkan 15 Desa tercapai 15 Desa (100%), di tahun 2020 juga mengalami peningkatan walaupun hanya tercapai 19 Desa (76%). Penyebab tahun 2020 tidak sepenuhnya tercapai dikarenakan di tahun anggaran 2020 kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami refocusing anggaran yang secara langsung berdampak terhadap rendahnya anggaran di semua lini pada masing-masing organisasi perangkat daerah, dan hal ini

tentunya juga sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian Indeks Desa Membangun. Selain itu Hasil dari analisis 6 Desa yang tidak naik statusnya menjadi desa berkembang dikarenakan dari hasil perhitungan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dijelaskan bahwa nilai komposit Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) berada dirata rata dinilai 0,51, 0,55 dan 0,59 sedangkan untuk skor yang diperlukan ditahun 2020 untuk menaikkan status IDM adalah 0,6750.

- Alternatif/Solusi :
 1. Berada dalam situasi seperti ini maka diperlukan strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang minimal tetapi mampu mendapatkan hasil atau target yang maksimal. Peningkatan koordinasi dengan jajaran Dinas PMD Kabupaten, serta mengoptimalkan kinerja tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa merupakan strategi yang ditempuh untuk meningkatkan status IDM.
 2. Tetap memberikan dukungan kegiatan bagi Desa yang belum naik status IDM nya dan tetap menargetkan di tahun berikutnya, sehingga 6 Desa yang belum naik status IDM nya kedepannya telah berhasil meningkat status IDM nya.
 3. Berharap ditahun berikutnya tidak terjadi pengurangan ataupun refocusing anggaran, dan seharusnya ada penambahan dukungan anggaran.
 4. Melibatkan berbagai sektor, pihak ataupun Instansi diluar dari DPMPD sebagai team work yang mampu membantu menaikkan status IDM.

2. **Indikator Kinerja Persentase Bumdes Aktif**, sesuai dengan Target RPJMD DPMPD Prov.Kaltim tahun 2020 sebanyak 25 Desa. Untuk Indikator Persentase BUMDesa Aktif berada di bawah Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat , Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. Bidang ini bertanggungjawab atas Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dengan Kegiatan Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, yang merupakan Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur. Adapun hasil dari Persentase BUMdesa Aktif adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Target dan Realisasi BUMDesa Aktif Tahun 2020

No	Nama Desa	Nama BUMDes	Kecamatan	Kabupaten	Jenis Usaha
1	Kasungai,	Apa Keo	Batu Sopang	Paser	Simpan Pinjam
2	Muara Pasir	Harapan Pantai	Tanah Grogot	Paser	Tambak Desa
3	Sekuan Makmur	Sukuan jaya	Muara Komam	Paser	Simpan Pinjam
4	Muara Andeh	Andeh Jaya	Muara Samu	Paser	Simpan Pinjam
5	Tanjung Pinang	Usaha Bersama	Muara Samu	Paser	Simpan Pinjam
6	Sido Mulyo	Berkah Mandiri	Anggana	Kutai Kartanegara	Jasa Penyewaan



7	Menamang Kanan	Mega Jaya Kanan	Muara Kaman	Kutai Kartanegara	Perdagangan
8	Handil Terusan	Hanter Mandiri	Anggana	Kutai Kartanegara	Foto Copy dan ATK
9	Pela	Pela Indah Mandiri	Kota Bangun	Kutai Kartanegara	Pariwisata
10	Diaq Lay	On Proses	Muara Wahau	Kutai Timur	-
11	Tanjung Mangkalihat	On Proses	Kaliorang	Kutai Timur	-
12	Sandaran	On Proses	Sandaran	Kutai Timur	-
13	Kombeng Indah	On Proses	Kongbeng	Kutai Timur	-
14	Tanjung Jone	Tanjung Jone	Jempang	Kutai Barat	Sarang Burung Walet
15	Muara Ohong	Ohong Makmur	Jempang	Kutai Barat	Sarang Burung Walet
16	Anah	Urip Ngeliman	Long Iram	Kutai Barat	Perdagangan
17	Muara Jawaq	Muara Jawaq	Mook Manaar Bulatn	Kutai Barat	Kebun Singkong
18	Long Lanuk	Lanuk Permai	Sambaliung	Berau	Usaha Jasa dan Perdagangan
19	Inaran	On Proses	Sambaliung	Berau	-
20	Balikukup	Maju Bersama	Batu Putih	Berau	Listrik Kampung (PLTS)
21	Pegat Batumbuk	Cemar	Pulau Derawan	Berau	Penyewaan Alat Transportasi/Angkutan
22	Long Merah	Mata Air	Long Bagun	Mahakam Ulu	Air Bersih
23	Muara Ratah	Ratah Mandiri	Laham	Mahakam Ulu	Listrik Kampung (PLTS)
24	Danum Paroy	Nasan Lestari	Laham	Mahakam Ulu	Listrik Kampung (PLTS)
25	Long Hurai	Harin Araq	Long Bagun	Mahakam Ulu	Listrik Kampung (PLTS)

Dari Tabel di atas dapat dilihat Indikator Kinerja Persentase BUMDesa Aktif dengan target 25 Desa terealisasi sebanyak 25 Desa, secara persentase tercapai 100%.

- Keberhasilan/Kegagalan

Adapun permasalahan untuk yang berkaitan dengan BUMDesa di Tahun 2020, terjadinya rasionalisasi atau refocusing anggaran yang berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan pendukung atau kegiatan pengungkit persentase BUMDesa Aktif yaitu Penilaian BUMDesa yang di rencanakan penilaian di 7 Kabupaten.

- Peningkatan/Penurunan

Dari Target RPJMD yang telah ditetapkan selama 5 Tahun 2 tahun diawal telah tercapai 100 % dimana pada Tahun 2019 dari target yang ditetapkan 15 Desa tercapai 15 Desa begitupula ditahun 2020 dari target 25 Desa yang ditetapkan tercapai 25 Desa.

- Alternatif/Solusi :

1. Berharap kedepannya tidak ada lagi pengurangan ataupun refocusing anggaran guna meningkatkan persentase jumlah BUMDesa Aktif.
2. Untuk Solusi kedepannya telah dianggarkan kembali di tahun 2021 untuk Penilaian BUMDesa di 7 Kabupaten dengan harapan dapat memberikan semangat kepada BUMDesa yang telah berperan aktif untuk kemajuan Desa dengan memberikan penilaian BUMDesa terbaik.



3. **Indikator Kinerja Persentase Desa dengan Status berkembang**, sesuai dengan Target RPJMD DPMPD Prov.Kaltim Tahun 2020 adalah 25 Desa. Dari perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020, yang berhasil ditingkatkan statusnya dari desa tertinggal dan sangat tertinggal menjadi desa berkembang tercapai sebanyak 19 Desa atau 76 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Desa dengan Status Berkembang
Tahun 2020

Tahun	Kabupaten							Total
	Paser	Kukar	Kutim	Kubar	PPU	Berau	Mahulu	
2020	Desa Kasungai	Desa Sidomulyo	Desa Diaq Liay	Desa Tanjung Jone		Desa Long Lanuk	Desa Long Bagun	25 Desa Tercapai 19 Desa
	Desa Muara Pasir	Desa Handil Terusan	Desa Tanjung Mangkalihat	Desa Muara Ohong		Desa Inaran	Desa Long Hurai	
	Desa Sekuan Makmur	Desa Menamang Kanan	Desa Sandaran	Desa Anah		Desa Balikukup	Desa Muara Ratah	
	Desa Muara Andeh	Desa Pela	Desa Kombeng Indah	Desa Muara Jawaq		Desa Pegat Batumbuk	Desa Danum Paroy	
	Desa Tanjung Pinang						Desa Long Hurai	

Dari Tabel di atas dapat dilihat Indikator Kinerja Persentase Desa dengan status berkembang dengan target 25 Desa terealisasi sebanyak 19 Desa (berwarna merah tidak terealisasi). Untuk Indikator Persentase Desa dengan status berkembang berada di bawah Program Pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan, dengan 3 (Tiga) kegiatan pengungkit yaitu : Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa dengan Indikator kegiatan yaitu 5 Kabupaten yang dibina dan 50 Pendamping Desa yang dibina, yang merupakan Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar desa dengan target 1 laporan di 3 kawasan perdesaan dan Penguatan Informasi Pembangunan dengan target 1 laporan. Adapun data dari kegiatan Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa dengan sasaran kawasan perdesaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Sasaran Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
di 3 Kabupaten/Kawasan Perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020

No	Kabupaten	Desa	Luas (Km2)	(%)	Potensi Kawasan
1	Kutai Kartanegara	Bukit Pariaman	82,2	35,3	Pertanian,
		Kerta Buana	39,5	17	peternakan,
		Bangunrejo	36,3	15,6	perikanan,
		Embalut	26,9	11,5	pendukung lainnya
		Manunggal Jaya	15,5	6,7	(BUMDes,KUD,Pasar,
		Karang Tunggal	8,4	3,6	Infrastruktur jalan,
		Bukit Raya	12,3	5,3	Masyarakat dan
		Perjiwa	11,6	5	Gapoktan
	TOTAL		232,7	100,00	
2	Kutai Timur	Sangatta Selatan	572,987	34,74	Perkebunan karet,
		Sangkima	379,14	22,99	kelapa sawit,
		Teluk Sangkima	228,46	13,85	perikanan,
		Kandolo	162,019	9,82	peternakan,
		Teluk Pandan	306,74	18,60	pertanian, wisata
					pantai
	TOTAL		1.649,35	100,00	
3	Berau	Teluk Semanting	99,96	2,59	Hutan Mangrove,
		Pegat Batumbuk	547,18	14,18	bekantan, pantai,
		Kasai	41,37	1,07	laut
		Tanjung Batu	2,982,59	77,29	
	TOTAL		3.858,96	100,00	

semua target kinerja untuk kegiatan pengungkit Indikator Kinerja Persentase Desa dengan status berkembang dapat tercapai secara persentase 100%.

- Keberhasilan/Kegagalan :
 1. Terlaksananya Penyusunan Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan perdesaan Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Terlaksananya rapat-rapat intern dan koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan melalui rapat Intern terbatas dan webinar
 3. Terhimpunya data identifikasi pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, Data Badan Kerjasama Antar Desa, Badan Usaha Milik Desa bersama (BUMDesa) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) terlampir.
 4. Terhimpunnya data dan kerjasama desa dengan Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi/BUMN/BUMD/Swasta dan Pihak lainnya.
 5. Terhimpunnya data pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan
 6. Tercapainya laporan pengmenbangan dan Monitoring, Pembangunan Kawasan Perdesaan di 3 (Tiga) Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Berau



7. Tersampainya Informasi tentang pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan melalui Media Website, cetak dan Elektronik.
 - Peningkatan/Penurunan
 1. Diwilayah Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembangunan sarana - prasarana belum memadai dalam membantu pelaksanaan program pembangunan kawasan
 2. Belum dilaksanakan penataan batas Wilayah Administrasi
 3. Sinkronisasi OPD dan multi stakeholder terkait status bahan belum maksimal
 4. Pemetaan Wilayah pembangunan Kawasan Perdesaan belum ada.
 5. Belum pernah dilakukannya identifikasi potensi dan pengembangan kawasan perdesaan
 6. Belum aktifnya Koordinasi pembangunan kawasan perdesaan di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
 - Alternatif/Solusi
 1. Diperlukan alokasi anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kabupaten/Kota yang lebih besar untuk membuka akses jaringan dan menjadi suatu keharusan.
 2. Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi harus segera dibentuk dalam upaya untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten.
 3. Perlu dilaksanakan FGD dengan pihak terkait dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan
 4. Segera dilakukan pemetaan wilayah pembangunan kawasan perdesaan
 5. Akan dilakukan identifikasi pengumpulan data dan informasi terkait potensi dan pengembangan kawasan perdesaan
4. **Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Memperoleh Pembinaan**, sesuai dengan Target RPJMD DPMPD Prov.Kaltim Tahun 2020 adalah 25 Desa. Berada di Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, dengan Program pengungkit Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan 3 Kegiatan yaitu : Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Monitoring Penyaluran Keuangan Desa, dan peningkatan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun data capaian Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh Pembinaan sebagai berikut :

Tabel 5
Target dan Realisasi Peningkatan Kapasitas
Badan Permusyawaratan Desa
di 7 Kabupaten Tahun 2020

No	Kabupaten	Kecamatan	Nama BPD
1	Paser	Batu Sopang Tanah Grogot Muara komam	Kasungai Muara Pasir Sekuan Makmur



		Muara Samu Muara Samu	Muara Andeh Tanjung Pinang
2	Kutai Kartanegara	Anggana Anggana Muara Kaman Kota Bangun Samboja Samboja Samboja Samboja	Sidomulyo Handil Terusan Manamang Kanan Pela Kecamatan Beringin Bukit Raya Tani hakti Karya Jaya
3	Berau	Sambaliung Sambaling Batu Putih Pulau Derawan Biduk-biduk Segah	Long Lanuk Inaran Balikukup Pegat Batumbuk Teluk Sumbang Punan Malinau
3	Berau	Sambaliung Sambaling Batu Putih Pulau Derawan Biduk-biduk Segah	Long Lanuk Inaran Balikukup Pegat Batumbuk Teluk Sumbang Punan Malinau
4	Kutai Barat	Jempang Jempang Long Iram Mook Mara Bulant Bentian	Tanjung Jone Muara ohong Anah Muara jawaq Sambung
5	Kutai Timur	Muara Wahau Kaliorang Sandaran Kombeng Telen Muara Wahau	Diaq Lay Tanjung Mangkalihat Sandaran Kombeng Indah Marah Haloq Dabeq
6	Penajam paser Utara	Sepaku Sepaku Sepaku Sepaku Sepaku	
7	Mahakam Ulu	Long Bagun Long Bagun Laham Laham Long Pahangai	Long Merah Long Hurai Muara Ratah Danum Paroy Long Pahangai Dua

- Keberhasilan/Kegagalan :

1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target 7 Kab/Kota, dengan indikator kinerja Data Aparatur Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa yang belum dilakukan peningkatan Kapsitas telah tercapai di 7 Kabupaten Kota.
 2. Tahun 2020 target Untuk Monitoring Penyaluran Keuangan Desa dengan indikator kinerja Data penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan Desa di 7 Kabupaten, dan tercapai di 7 Kabupaten.
 3. Peningkatan penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dari target 10 Kab/Kota, dengan indikator kinerja Data dan Kelurahan di Prov.Kaltim yang mengikuti perlombaan desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi tidak tercapai atau terealisasi walaupun secara administrasi sedang berproses, namun karena adanya refocusing anggaran maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan, selain itu juga menyusun dengan dikeluarkannya Surat dari Kemendagri No. 414.4/2777 tentang Pembatalan Penyelenggaraan Lomba Desa dan kelurahan Tahun 2020, dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 414.4/2421/DPMPD tentang Pembatalan Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa/kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2020.
- Peningkatan/Penurunan
 1. Untuk Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2020 ditargetkan 7 Kabupaten dan tercapai di 7 Kabupaten, walaupun kegiatan hampir tidak terlaksana dikarenakan refocusing anggaran, namun terlaksana kembali setelah dianggarkan melalui APBD Perubahan.
 2. Keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD, sehingga pelaksanaan pelatihan belum bisa menyentuh semua Pemerintah Desa dan BPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang keseluruhan berjumlah 841 Desa.
 - Alternatif/Solusi
 1. Perlu adanya koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Prov.Kaltim dalam hal ini DPMPD Prov.Kaltim dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini DPMD Kabupaten untuk membatasi Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga non Pemerintah, dan harus memperhatikan dari segi materi/modul pelatihan dan pelatih yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
 2. Menjalin sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Desa dan BPD dalam hal pendanaan, pemenuhan pelatih yang memiliki kompetensi yang bersertifikasi, modul/materi yang sudah standar, dan ketentuan atau syarat-syarat lain yang ditetapkan untuk Pemerintah Desa dan BPD



- (Contoh : Desa tertinggal dan sangat tertinggal, Kepala Desa dan BPD yang baru dilantik namun belum dilakukan peningkatan Kapasitas Desa).
3. Menganggarkan kedepannya di tahun 2021 untuk kegiatan Lomba Penyelenggaraan lomba Cerdas Cermat Desa dan Kelurahan serta Lomba Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur 2021, sebagai salah satu kegiatan untuk pengungkit dari indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Memperoleh Pembinaan.
4. **Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan yang aktif**, Indikator ini berada di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, diungkit dengan 2 (dua) Program yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Program Pemberdayaan Adat dan pengembangan Kehidupan Sosial Budaya, dengan indikator kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa dan Kelurahan. Adapun untuk mencapai indikator kinerja ini diperlukan data target LKD yang harus dicapai sebagai berikut :

Tabel 6
Target dan Realisasi LKD tahun 2020

NO	KABUPATEN	LKD DESA/KELURAHAN
1	Berau	LA Bena baru
2	Berau	LA Tepian Buah
3	Kutai Timur	LA Miau Baru
4	Kutai Kartanegara	LPM Pela
5	Kutai Kartanegara	LPM Benua Baru
6	Kutai Kartanegara	LPM Sebelimbingan
7	Kutai Kartanegara	LPM Liang
8	Kutai Kartanegara	LPM Kota Bangun Ulu
9	Kutai Kartanegara	LPM Sumber Sari
10	Kutai Kartanegara	LPM Kedhang Ipil
11	Kutai Kartanegara	LPM Uhuran
12	Kutai Kartanegara	LPM Kedhang Muray
13	Kutai Kartanegara	LPM Loleng
14	Kutai Kartanegara	LPM Sari Hadi
15	Mahakam Ulu	LPM Long Hubung Ulu
16	Kutai Barat	LPM Long Hubung Mer
17	Kutai Barat	LPM Datah Bilang Ulu
18	Kutai Barat	PKK Kedhang Ipil
19	Samarinda	Posyandu Anyelir Kel. Mugirejo
20	Paser	Posyandu Delima Desa Batu kajang
21	Paser	Posyandu manunggal Desa Klempang Sari
22	Kutai Barat	PKK Kampung Sekolaq oday
23	PPU	PKK Desa Wonosari
24	Balikpapan	Psyandu Ria Kencana 14 Kelurahan Prapatan



25	Berau	Posyandu Medang Jaya Kampung Ampen Medang
26	Kutai KartaNegara	Posyandu Dahlia Desa manunggal jaya
27	Paser	PKK Desa batu kajang
28	Berau	Posyandu Melati Jatida Kampung Pandan Sari
29	Berau	LPM kampung Maluang
30	Balikpapan	Posyandu Bina Mitra Sejahtera Kelurahan Gunung Bahgia B
31	Berau	Posyandu Melati Makmur Kampung Bukit Makmur
32	Kutim	Poysandu Sukma Desa Sukamaju
33	Kukar	LPM Desa Bukit Raya
34	Samarinda	Posyandu Menur Kelurahan Bugis
35	Samarinda	PKK Kelurahan Mugirejo

Selain itu sebagai pengungkit kegiatannya lainnya guna meningkatkan presentasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan yang aktif yaitu Pengembangan Kapasitas Masyarakat yang di tahun 2020 di targetkan pembinaan sebanyak 150 Kader Pemberdayaan Masyarakat di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kutai kartanegara, Kubar dan Mahulu dengan data capaian sebagai berikut :

Tabel 7
Target dan Realisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang telah mendapatkan Pembinaan di Tahun 2020

No	Kabupaten	Unsur peserta		Pelatihan KPM
1	Kutai Kartanegara	15 Orang 21 Orang 8 Orang	KPMD Perwakilan Aparatur Desa Tenaga Pendamping Desa Kota Bangun	Teknik Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Administrasi Desa Prov.Kaltim
2	Kutai Barat	30 Orang 6 Orang 2 Orang 6 Orang 4 Orang	Kelompok Masyarakat Petinggi/Kepala Desa Tenaga Medis Kader Pembangunan Manusia Perwakilan TPP Kec.Barong Tongkok	Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Provinsi Kalimantan Timur
3	Mahakam Ulu	30 Orang 14 Orang 2 Orang 4 Orang	Kelompok Masyarakat Perwakilan Aparatur Desa Perwakilan Kec.Long Hubung Perwakilan TPP Long Hubung	Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Prov.Kaltim



- Keberhasilan/Kegagalan
 1. Tahun 2020 melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya dari Indikator Kinerja persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif melalui data target 35 LKD tercapai 100 %
 2. Indikator ini dilaksanakan melalui pelaksanaan dan Pembinaan BBGRM, Pembinaan PKK, Pembinaan LPM Pembinaan Posyandu, Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
 3. Untuk Tahun 2020 kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat yang di targetkan pembinaan sebanyak 150 Kader Pemberdayaan Masyarakat di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kutai Kartanegara, Kubar dan Mahulu terealisasi sebanyak 150 KPM sesuai dengan yang ditargetkan secara persentase tercapai 100%
- Peningkatan/Penurunan
 1. Kurangnya Pembinaan PKK yang berkesinambungan dari Provinsi, kabupaten, Kota dan Kecamatan.
 2. Tidak ada alokasi khusus dari Kabupaten /Kota untuk penilaian BBGRM
 3. Sosialisasi terkait dengan tugas dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat
 4. Kurangnya koordinasi dengan jajaran Dinas PMD Kabupaten terkait dengan kinerja KPM, tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa
 5. Masih rendahnya tingkat pemahaman Aparatur Desa dan Masyarakat terkait dengan Masyarakat Hukum Adat .
 6. Kurangnya anggaran terkait MHA
 7. Data Desa terkait Masyarakat Hukum Adat
- Alternatif/Solusi
 1. Perlu adanya Pembinaan PKK yang berkesinambungan dari Provinsi, kabupaten, Kota dan Kecamatan.
 2. Kabupaten/Kota agar mengalokasikan anggaran untuk penilaian BBGRM
 3. Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan terkait dengan tugas dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat
 4. Meningkatkan koordinasi dengan jajaran Dinas PMD Kabupaten terkait dengan kinerja KPM, tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa
 5. Mengadakan Sosialisasi terkait pemahaman Aparatur Desa dan Masyarakat terkait dengan Masyarakat Hukum Adat .
 6. Merekomendasikan kepada TAPD Prov.Kaltim agar dapat memberikan dukungan anggaran yang maksimal terkait dengan kegiatan pengembangan MHA.
 7. Memiliki data base terkait MHA



5. **Indikator Kinerja Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim**, Indikator ini berada di Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat , Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna., diungkit dengan Program Kampung Iklim dengan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Emisi Rendah Desa/Village Low Emission Development. Adapun data Target dan realisasi Desa /Kampung Iklim yang terbentuk sebagai berikut :

Tabel 8
Target dan Realisasi Desa/Kampung Iklim yang terbentuk

No.	Kabupaten	DESA/KAMPUNG
1	Kutai Barat	Sembun
2		Temula
3		Deras
4		Gerunggung
5		Saka Lotoq
6		Marimun
7		Kalian Luar
8		Muara Nyahing
9		Ujoh Halang
10		Kelumpang
11		Sambung
12		Tepina Ulak
13		Muara Jawaq
14		Saka Tada
15		Rembayan
16		Abit
17		Tondoh
18		Muara Bomboy
19		Tepulang
20		Jangan Danum
21		Mendika
22		Benung
23		Linggang Kebut
24		Linggang Amer
25		Bingung Baru
26		Melapeh Baru
27		Anah
28		Kelwai
29		Lendian Lian Nayuk
30		Kendisiq
31		Muara Batuq
32		Anan Jaya
33		Besiq
34		Bermai
35		Mantar
36		Minta



37	Kutai Barat	Tepian Ulaq
38		Sembuan
39		Lakan Bilem
40		Intu Lingau

Untuk tahun 2020 Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim terlaksana dengan melaksanakan Sosialisasi Program Kampung Iklim di Kabupaten Kutai Barat yang bertujuan meningkatkan Indeks Desa Membangun menuju Desa rendah emisi.

- Keberhasilan/Kegagalan
Untuk Indikator Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim Tahun 2020 sebanyak 40 Desa, terealisasi 40 Desa secara persentase terealisasi 100 %.
- Peningkatan/Penurunan
Terjadi peningkatan untuk tahun 2020 terealisasi 100 %
- Alternatif/Solusi
 1. Untuk tahun berikutnya atau yang akan datang tetap dilaksanakan Sosialisasi Program Kampung Iklim di Kabupaten Lainnya, dan diharapkan tidak hanya kegiatan Sosialisasi saja tetapi juga kegiatan lainnya tentunya hal ini juga perlu adanya dukungan anggaran.
 2. Membentuk team work dengan melibatkan usur opd terkait baik Provinsi maupun Kabupaten guna meningkatkan status Indeks Desa Membangun menuju Desa rendah emisi.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	76.00	88.95	12,95

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- ✚ Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa secara keseluruhan memiliki 14 Program dan 26 Kegiatan dan semuanya sangat berpengaruh besar terhadap capaian Indikator kinerja. Adapun kegiatan yang tidak bisa terlaksana di tahun 2020 adalah penilaian BUMDesa dan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan dikarenakan adanya refocusing anggaran, dan kegiatan ini merupakan kegiatan pengungkit yang dapat membantu menaikkan status IDM.



D. Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	25	19	76	16.411.712.030	14.597.966.586	88.95

E. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	2.372.718.330	2.269.732.102	95.66	
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	2.372.718.330	2.269.732.102	95.66	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	670.482.560	669.909.955	99.91	
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana	670.482.560	669.909.955	99.91	
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	955.250.000	935.826.064	97.97	
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	955.250.000	935.826.064	97.97	
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.	220.103.788	215.087.743	97.72	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	180.103.788	175.298.593	97.33	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	40.000.000	39.789.150	99.47	



No	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
5	Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan	546.830.840	546.234.016	99.89	
	Kegiatan pengembangan dan Monitoring Lembaga serta organisasi Masyarakat Perdesaan	209.895.227	209.861.003	99.98	
	Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	59.000.000	59.000.000	100	
	Kegiatan Pengembangan kapasitas Masyarakat	183.392.727	183.392.727	100	
	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat	94.542.886	93.980.286	99.40	
6	Program pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat	329.477.200	326.356.700	99.05	
	Kegiatan Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	329.447.200	326.356.700	99.05	
7	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	80.000.000	79.959.000	99.95	
	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	80.000.000	79.959.000	99.95	
8	Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	276.350.000	270.803.875	97.99	
	Kegiatan Sinkronisasi dan Penyerasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat	276.350.000	270.803.875	97.99	
9	Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	155.646.700	154.721.600	99.41	
	Kegiatan Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	85.716.700	85.121.500	99.31	



No	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat	69.930.000	69.600.000	99.53	
10	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	952.500.000	942.497.800	98.95	
	Kegiatan pengembangan dan Monitoring Ketahanan Keluarga dan Pelestarian Nilai-nilai Kegotong royongan	720.750.000	711.251.000	98.86	
	Kegiatan Penguatan Kapasitas Kesejahteraan Keluarga	32.100.000	31.650.000	98.60	
	Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga	182.500.000	182.458.100	99.98	
	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Hidup Sehat Keluarga Yang Ramah Lingkungan	171.150.000	17.138.700	99.93	
11	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2.000.000	2.000.000	100	
	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan teknologi Tepat Guna	2.000.000	2.000.000	100	
12	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan	1.043.163.025	1.016.068.743	97.40	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	690.000.000	674.132.518	97.70	
	Kegiatan Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	144.371.525	138.786.725	96.13	
	Kegiatan Peningkatan Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	208.791.500	203.149.500	97.30	
13	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	299.576.587	287.071.187	95.83	



No	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	118.451.787	113.078.887	95.46	
	Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	100.136.400	95.593.100	95.46	
	Kegiatan Penguatan Informasi Desa	80.988.400	78.399.200	96.80	
14	Program Kampung Iklim	177.100.000	173.980.000	98.24	
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Emisi Rendah Desa/Village Low Emission Development (VLED)	177.100.000	173.980.000	98.24	
	TOTAL	8.081.199.030	7.890.248.682	97.64	



BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Untuk mencapai Sasaran Indikator Kinerja Utama dilaksanakan Program/Kegiatan, baik program/kegiatan utama maupun program/kegiatan pengungkit lainnya. Adapun Program/Kegiatan yang berada di DPMPD Prov. Kaltim sebagai berikut :

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 2. Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 3). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
 3. Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah
- 4). Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
 5. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- 5). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 6. Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan
 7. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
 8. Pengembangan Kapasitas Masyarakat
 9. Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosialisasi Budaya Masyarakat
- 6). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
 10. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
- 7). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 8). Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
 12. Sinkronisasi dan Penyerasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat.
- 9). Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
 13. Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
 14. Pengembangan Prasarana dan Sarana Sosial Dasar Masyarakat.
- 10). Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.



15. Pengembangan dan Monitoring Ketahanan keluarga dan Pelestarian nilai nilai Kegotong – royongan.
16. Penguatan Kapasitas Kesejahteraan Keluarga.
17. Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga.
18. Pengembangan dan Monitoring Hidup Sehat Keluarga yang Ramah Lingkungan.
- 11). Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat
 19. Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- 12). Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 20. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan
 21. Monitoring Penyaluran Keuangan Desa
 22. Peningkatan Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 13). Program Pembangunan Desa dan Kawasan
 23. Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa
 24. Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa
 25. Penguatan Informasi Pembangunan
- 14). Program Kampung Iklim
 26. Pemberdayaan dan Pengembangan Emisi Rendah Desa/Village Low Emission Development (VLED)

Dalam Penyelenggaraan Program/Kegiatan Utama Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdapat permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.
- Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
- Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.



- Adanya kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing kawasan.
- Belum optimalnya penggalian dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa.
- Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA lokal.
- Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan.
- Belum tersedianya tanah kas Desa.
- Belum optimalnya penegasan batas antar desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat
- Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan.

Peluang dalam peningkatan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut :

- ✚ Peluang yang berasal dari internal dan bisa di kontrol (*Controllable*) adalah :
 1. Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
 2. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
 3. Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa/Kelurahan.
 4. Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.



✚ Peluang yang berasal dari lingkungan eksternal dan teridentifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bumdesa.
5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur yang memberikan mandat dan wewenang yang jelas kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Timur untuk berkiprah lebih maksimal.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dibawah koordiasi 2 (dua) Kementerian yakni Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri dengan demikian membuka luas program/kegiatan dibawah kontrol dua Kementerian tersebut.

B. Saran

Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Dalam kaitan dengan hal tersebut maka saran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa antara lain :

1. Kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan rujukan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2. Peran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung dan pemerintahan kelurahan.
3. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas dibidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik dan aspek lingkungan.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan secara nasional, dan merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta memiliki posisi strategis dalam mencapai keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.
5. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki keleluasaan kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



6. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi refocusing anggaran yang menjadi salah satu penyebab terhadap penurunan kenaikan status IDM.
7. Perlu diperhatikan kembali didalam penilaian IDM yang didalamnya terdapat komposit penilaian indeks Ekonomi, Lingkungan dan Sosial.
8. Setiap bidang ataupun teknis yang melaksanakan kegiatan berupaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan diawal walaupun dengan anggaran yang minimalis.

Samarinda, 2021

Kepala,

H.M. Syirajudin, SH, MT
NIP. 196602081987011003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja setiap tahunnya merupakan tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh realisasi kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan perencanaan yang telah dibuat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon II dengan Gubernur Kalimantan Timur yang selama tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah.

Untuk tahun 2020 kinerja yang dinilai dalam LkjIP berjumlah 6 (enam) sasaran, dengan 6 (Enam) indikator kinerja utama yang diungkit dengan 14 (Empat Belas) program dan (Dua Puluh Enam) kegiatan dengan nilai capaian sasaran kinerja rata-rata sebesar 97.64 %.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan program masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target, namun dapat diatasi dengan baik sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan. Dimana pada tahun 2020 kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami refocusing anggaran yang secara langsung berdampak terhadap pencapaian kinerja, dan rendahnya anggaran disemua program kegiatan. Berada dalam kondisi ini maka butuh sebuah strategi bagaimana cara memanfaatkan dana yang minimal tetapi mampu membuahkan hasil atau pencapaian target yang maksimal.

Diharapkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 ini dapat menjadi tolak ukur peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang.

Kepala,

H.M. Syirajudin, SH, MT
NIP. 196602081987011003



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat, karunia-Nya, perlindungan serta petunjuk-Nya jualah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebagai bentuk transparansi Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, selain itu juga bertujuan untuk mengukur, meanalisis, mengetahui realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan yang ditetapkan didalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini akan memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 2021

Kepala,

H.M. Syirajudin, SH, MT
NIP. 196602081987011003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERJANJIAN KINERJA (PK)

**INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU
(IKI)**

RENCANA AKSI

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN
(RKT)**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKIP DARI
INSPEKTORAT PROVINSI**

LAPORAN KINERJA PERTRIWULAN

PENGUKURAN KINERJA (REALISASI)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Aparatur	3
E. Aspek Strategis Organisasi	6
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	6
G. Sarana dan Prasarana Kerja	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	8
B. Indikator Kinerja Utama	15
C. Perjanjian Kinerja	16
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya	19
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	24
C. Analisis Capaian Kinerja	26
D. Realisasi Anggaran	41
 BAB IV PENUTUP	45
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
2. PERJANJIAN KINERJA	
3. PENGUKURAN KINERJA (REALISASI)	
4. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)	
5. RENCANA AKSI ATAS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	
6. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	
7. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP DARI INSPEKTORAT PROV.KALTIM TAHUN 2020	
8. LAPORAN KINERJA PERTRIWULAN	



B. Indikator Kinerja Utama

- 1 Perangkat Daerah

:

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur
- 2 Tugas

:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang menjadi kewenangan daerah Provinsi an tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi
- 3 Fungsi

:

a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

c. Perumusan, perencanaan,pembinaan,koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kelurahan

d. Perumusan, perencanaan,pembinaan,koordinasi dan pengendalian bidang pemerintahan desa dan kawasan perdesaan

e. Perumusan, perencanaan,pembinaan,koordinasi dan pengendalian bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat

f. Perumusan, perencanaan,pembinaan,koordinasi dan pengendalian bidang usaha ekonomi masyarakat, SDA dan TTG

g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan

h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Laporan (angka absolute)	Data Hasil Perhitungan Indikator Desa Membangun	DPMPD Prov.Kaltim
		2 Persentase Bumdesa Aktif	$\frac{\sum \text{BUMdes Aktif}}{\sum \text{BUMdes}} \times 100\%$	Data Kabupaten	
		3 Persentase Desa dengan status berkembang	$\frac{\sum \text{Desa Berkembang}}{\sum \text{Desa}} \times 100\%$	Data Hasil Perhitungan Indikator Desa Membangun	
		4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan yang memperoleh pembinaan	$\frac{\sum \text{Desa /Kelurahan yang dibina}}{\sum \text{Desa /Kelurahan}} \times 100\%$	Data Kabupaten	
		5 Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	$\frac{\sum \text{Lembaga Aktif}}{\sum \text{Lembaga}} \times 100\%$	Data Kabupaten	
		6 Persentase Desa yang menjadi Kampung Iklim	$\frac{\sum \text{Desa Kampung Iklim}}{\sum \text{Desa Kampung Iklim}} \times 100\%$	Data Kabupaten	



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator sasaran	Satuan	Capaian s.d Tahun 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	518	503	478	448	413	368
		2 BUMDesa yang Aktif		2 Jumlah BUMDES yang Aktif (Bumdesa)	Bumdes	320					
				1 Jumlah Bumdesa yang aktif	Bumdes		335	360	390	425	470
					Bumdes		15	25	30	35	45
		3 Desa dengan status berkembang berkembang		3 Jumlah Desa dengan status berkembang	Desa	289	304	329	359	394	439
				1 Kabupaten yang dibina	Kabupaten		5	5	5	5	5
				2 Pendamping desa yang dibina	Orang		50	50	50	50	50
				3 Tercapainya Penguatan pengembangan dan pembangunan antar desa	Laporan		1	1	1	1	1
				4 Tercapainya data dan informasi pembangunan desa dan antar desa	Laporan		1	1	1	1	1
		4 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh Pembinaan		4 Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan yang memperoleh pembinaan	Desa	323	338	363	393	428	473
				1 Data aparatur desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan desa yang belum dilakukan peningkatan kapasitas	Kab/Kota		10	10	10	10	10
				2 Data Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dan RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan desa	Kabupaten		7	7	7	7	7
				3 Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2019	Kab/Kota		10	10	10	10	10
				5 Jumlah Peningkatan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	Desa	323	338	363	393	428	473
				1 Jumlah Pelaksanaan BBGRM	Kab/Kota		10	10	10	10	10
				2 Jumlah PKK yang dibina	PKK		10	10	10	10	10
				3 Jumlah LPM yang dibina	LPM		10	10	10	10	10
				4 Jumlah Posyandu yang dibina	Posyandu		6	6	6	6	6



				5 Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina	Orang		150	150	150	150	150
				6 Jumlah MHA yang dibina	MHA		5	5	5	5	5
		6 Jumlah Kampung/desa Iklim (Desa)		6 Jumlah Kampung/desa Iklim (Desa)	Desa	0	15	40	70	105	150
				1 Jumlah kampung Iklim + yang terbentuk	Desa		15	40	70	105	150



C. PERJANJIAN KINERJA

SASARAN			
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	TW 1 : 0
			TW 2 : 0
			TW 3 : 0
			TW 4 : 25
	2 Persentase BUMDesa Aktif	BUMdes Aktif	TW 1 : 0
			TW 2 : 0
			TW 3 : 0
			TW 4 : 25
	3 Persentase Desa dengan Status berkembang	Desa berkembang	TW 1 : 0
			TW 2 : 0
			TW 3 : 0
			TW 4 : 25
	4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan		TW 1 : 0
			TW 2 : 0
			TW 3 : 0
			TW 4 : 25
	5 Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif		TW 1 : 0
			TW 2 : 0
			TW 3 : 0
			TW 4 : 25
	6 Persentase Desa yang menjadi kampung Iklim		TW 1 : 0
			TW 2 : 0
			TW 3 : 0
			TW 4 : 40

**Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1 Persentase BUMDesa Aktif	Bumdes	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat
			1 Jumlah Bumdesa yang Aktif	Bumdes		
			2 Persentase Desa dengan status berkembang	Desa	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	1 Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa
			1 Kabupaten yang dibina 2 Pendamping desa yang dibina 3 Tercapainya Penguatan pengembangan dan pembangunan antar desa 4 Tercapainya data dan informasi pembangunan desa dan antar desa	Kabupaten Orang Laporan Laporan		2 Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa 3 Penguatan Informasi Pembangunan
			3 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan	Desa	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan 2 Monitoring Penyaluran Keuangan Desa 3 Peningkatan Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			1 Data aparatur desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan desa yang belum dilakukan peningkatan kapasitas	Kab/Kota		
			2 Data Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dan RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan desa	Kabupaten		
			3 Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2019	Kab/Kota		



No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4 Persentase Peningkatan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif</p> <p>1 Jumlah Pelaksanaan BBGRM</p> <p>3 Jumlah LPM yang dibina</p> <p>4 Jumlah Posyandu yang dibina</p> <p>5 Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dibina</p> <p>6 Jumlah MHA yang dibina</p>	<p>Desa</p> <p>Kab/Kota</p> <p>LPM</p> <p>Posyandu</p> <p>Orang</p> <p>MHA</p>	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	<p>1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan</p> <p>2 Pengembangan Kapasitas Masyarakat</p> <p>3 Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Sosial Budaya</p>
			<p>5 Persentase Desa yang menjadi kampung iklim</p> <p>1 Jumlah kampung Iklim + yang terbentuk</p>	Desa	Program Kampung Iklim	<p>1 Pemberdayaan dan Pengembangan Emisi rendah Desa/Village Low Emissin Development (VLED)</p>



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prov.Kaltim

No 1	Sasaran 2	Indikator Kinerja Utama 3	Target 4	Program/Kegiatan 5	Anggaran 6	Ket 7
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	<div>1 Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal</div> <div>2 Persentase BUMDesa Aktif</div> <div>3 Persentase Desa dengan Status berkembang</div> <div>4 Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan</div> <div>5 Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif</div> <div>6 Persentase Desa yang menjadi kampung Iklim</div>	<div>25 Desa</div> <div>25 Desa</div> <div>25 Desa</div> <div>25 Desa</div> <div>25 Desa</div> <div>40 Desa</div>	<div>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Kegiatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat</div> <div>Program Pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa Kegiatan Pengembangan dan monitoring Pembangunan Antar Desa Kegiatan Penguatan Informasi Desa</div> <div>Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan</div> <div>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan</div> <div>Kegiatan Monitoring Penyaluran Keuangan Desa kegiatan peningkatan Penataan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</div> <div>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</div> <div>Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Lembaga serta Organisasi Masyarakat Perdesaan Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Ketahanan dan Monitoring Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat</div> <div>Program Kampung Iklim Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan Emisi Rendah Desa/Village Low Emission Development (VLED)</div>	<div>329,447,200</div> <div>118,451,787</div> <div>100,136,400</div> <div>80,988,400</div> <div>690,000,000</div> <div>144,371,525</div> <div>208,791,500</div> <div>209,895,227</div> <div>59,000,000</div> <div>183,392,727</div> <div>94,542,886</div> <div>177,100,000</div>	